

PENDEKATAN INTERPRETATIF DALAM KAJIAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

oleh

Leli Salman Al Farisi

Instansi

Ditjen Otonomi Daerah-Kementrian Dalam Negeri

Email: salpolpum@gmail.com

Received : Februari 19, 2026

Revisi : Februari 26, 2026

Accepted : Februari 27, 2025

Available online : Februari 28, 2026

DOI: 10.31943/aspirasi.v16i1.147

Abstrak: Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas konsepsi dan aktualisasi metodologis pendekatan interpretatif dalam rangka mengkaji pemikiran politik Islam, di mana esensi dari pendekatan interpretasi ini adalah menemukan pemahaman terhadap makna dibalik fenomena sosial dan teks. Pendekatan interpretatif muncul karena dua alasan; Pertama adalah bahwa orang bertindak atas dasar keyakinan dan preferensi mereka. Kedua munculnya pendekatan interpretatif adalah bahwa kita tidak dapat memisahkan keyakinan dan preferensi orang dari fakta obyektif tentang mereka seperti kelas sosial, ras, atau posisi institusionalnya. Namun, pendekatan interpretasi ini pun mendapat kritikan tajam dari ilmuwan sosial dan ilmuwan eksakta yaitu pertama, bahwa teori interpretatif tidak secara memadai memperhitungkan realitas material; dan kedua, bahwa teori interpretatif tidak memberikan landasan untuk mengkritisi kehidupan sosial. Oleh karena itu, untuk mengaktualisasikan pendekatan interpretatif dalam kajian pemikiran politik Islam masih perlu terus dikaji ulang dan dikembangkan oleh para ilmuwan politik itu sendiri.

Kata Kunci: pemikiran politik islam interpretatif, politik Islam, fenomena sosial, Dan teks.

PENDAHULUAN

Pendekatan interpretatif bagi studi Ilmu Politik berfokus pada makna yang membentuk aksi dan institusi, dan cara mereka melakukannya. Epistemologi mengajukan pertanyaan tentang 'bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui tentang ilmu politik?'. Teori interpretatif merupakan seperangkat jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Di balik berbagai jenis teori interpretatif, ada asumsi yang sama, bahwa kita tidak dapat memahami hubungan manusia secara semestinya jika kita tidak memahami makna yang terkait. Aneka ragam teori interpretatif memahami makna dengan cara yang berbeda-beda. Mereka bisa berupa ungkapan dari alasan, maksud, keyakinan, alam bawah sadar, atau sebuah sistem tanda. Mereka juga menjelaskan makna dengan cara yang berbeda-beda, menggunakan ungkapan seperti progresi logika, penempatan individu, dan hubungan struktural antara konsep dan kekuasaan. Singkatnya, pendekatan interpretatif mempelajari keyakinan, ide atau wacana. Arti pentingnya, mereka mempelajari keyakinan yang bermain di dalam—dan bahkan menyusun—aksi, praktik, dan institusi. Teori interpretatif berlaku untuk semua kajian politik.¹

Ilmu politik berasal-mula dari bidang ilmu seperti sejarah, hukum, dan filsafat, yang di situ interpretatif sering memainkan peran dominan di dalamnya. Sejarawan berfokus pada peristiwa tertentu yang dipaparkan secara kronologis. Sejarawan berusaha membongkar kepercayaan dan motif mereka yang terlibat dalam riwayat tersebut. Adapun pengacara melihat pada sisi formal sebuah institusi. Mereka berusaha menggali maksud pembuat hukum, untuk memutuskan bagaimana menerapkan hukum tersebut. Sementara itu, para filsuf menyelidiki sisi normatif dari kehidupan sosial. Mereka berusaha menemukan cita-cita yang telah dijadikan sebagai suatu panduan tentang bagaimana kita harus berlaku. Berdampingan dengan aneka ragam studi politik ini, muncul juga pendekatan yang lebih condong berhutang budi pada ilmu alam, yang mencoba menemukan hukum atau aturan yang mengatur kehidupan sosial tanpa memandang keyakinan individu atau makna yang ditemukan dalam suatu masyarakat.²

Setelah Perang Dunia Kedua, studi politik menjadi saksi kemunculan dan kepopuleran behaviorisme, strukturalisme, dan—yang lebih terkini—teori pilihan (*rational choice theory*), yang semuanya mempunyai ambisi-ambisi ilmiah. Jadi, teori interpretatif saat ini mempunyai dua akar utama. *Pertama*, ada pendekatan interpretatif yang berakar pada ilmu kemanusiaan, khususnya sejarah. Ilmu tersebut bersumber dari hermeneutika dan filsafat fenomenologi yang berusaha memahami makna yang dilekatkan orang pada

¹ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media. 2010. Hal: 158.

² David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 159.

tindakan sosial. *Kedua*, pendekatan-pendekatan baru terhadap teori interpretatif, yang tumbuh subur seiring meningkatnya kesadaran tentang kekeliruan pandangan tujuan ilmiah behaviorisme dan strukturalisme. Pendekatan-pendekatan ini bersumber dari filsafat pos-strukturalis dan post-modern.³

Menurut David Marsh, bahwa arti penting pendekatan interpretif muncul karena dua alasan. *Alasan pertama*—yang gamblang—adalah bahwa orang bertindak atas dasar keyakinan dan preferensi mereka. Adapun, *alasan kedua* munculnya pendekatan interpretatif adalah bahwa kita tidak dapat memisahkan keyakinan dan preferensi orang dari fakta obyektif tentang mereka seperti kelas sosial, ras, atau posisi institusionalnya. Kemustahilan adanya pengalaman murni mengisyaratkan bahwa kita tidak dapat mereduksi keyakinan dan preferensi menjadi sekedar variabel pengaruh.⁴ Lebih lanjut, menurut Marsh dua alasan dasar ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa interpretasi itu penting. Namun, ada alasan-alasan untuk menuntut secara tegas tentang peran khusus interpretasi dalam menjabarkan suatu ciri kehidupan sosial. Satu kancha yang jelas adalah ideologi, yang digunakan aktor-aktor politik untuk melgitimasi aksi mereka, tanpa memandang motivasi mereka yang sebenarnya.⁵ Karena ideologi merupakan yang pertama dan terkemuka dari kumpulan simbol dan representasi yang memudahkan pembentukan makna dan inteprasi sosial suatu tindakan. Dalam pemahamannya yang mendasar, ideologi merupakan satu fenomena positif yang mengekspresikan kebutuhan beberapa kelompok untuk membangun image tentang dirinya, untuk mengisi kesenjangan antara asal-usul dan aktualisasinya, antara membuat rancangan dan kehilangan memori kolektifnya.⁶ Berdasarkan konsepsi netral ideologi dijelaskan bahwa ideologi dapat dilihat sebagai 'sistem pemikiran', 'sistem keyakinan' atau sistem simbol' yang berhubungan dengan tindakan sosial dan praktik politik.⁷ Kendati demikian, konsep netral ideologi apa pun tetap saja mengandung bahaya dalam dirinya. Khususnya, ketika semua muatan politiknya sudah dihilangkan sehingga konsep itu berubah menjadi sangat fleksibel dan umum, maka konsep itu akan kehilangan tatapan kritisnya. Oleh karena itu, Andrew Heywood merumuskan ideologi sebagai seperangkat ide koheren yang menyediakan basis bagi tindakan politik terorganisasikan

³ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 159-160.

⁴ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 160-161.

⁵ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 161.

⁶ John B. Thompson. *Analisis Ideologi Dunia; Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia*. Jogjakarta: IRCiSoD. 2014. Halaman: 249.

⁷ John B. Thompson. *Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikanansi Massa...* Halaman: 15.

entah dimaksudkan untuk mempertahankan, memodifikasi atau menggantikan sistem kuasa yang sudah ada.⁸

Lebih lanjut John B. Thompson, berpandangan bahwa isu-isu yang sifatnya metodologi sangat penting, karena dalam menyebutkan tema ideologi kita harus bertanya, bukan hanya bagaimana ideologi harus dikonseptualisasikan dan bagaimana hubungannya dengan bahasa secara umum harus dipahami, tapi juga bagaimana ideologi dapat dianalisa, terutama dan nyata, dalam ungkapan-ungkapan yang diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam upaya merespon tuntutan metodologis ini, Thompson menggambarkan sebuah teori tentang interpretasi ideologi. Kata *interpretation* digunakan dengan penuh pertimbangan: kata tersebut mengandung muatan pemikiran yang, dalam beberapa abad, menekuni persoalan-persoalan makna dan penafsiran.⁹

Fenomena negatif tentang Islamisme berdampak langsung terhadap tatanan politik Islam yang selalu disalahpahami, dipandang keliru, distorsif bahkan delusif dalam wacana Politik Global Islam telah menarik perhatian para pakar untuk melakukan kajian ulang dan mengkonstruksikan kembali teori politik Islam. Para teoritikus Barat telah menempatkan Islamisme sebagai sebuah ideologi politik yang berakar pada fundamentalisme Islam, tidak kompatibel dan anti demokrasi liberal, serta menolak sekularisme politik. Oleh karena itu, dibutuhkan untuk melakukan tafsir ulang terhadap teks dan doktrin teologis politik Islam yang mendasari munculnya berbagai ideologi politik dalam pemikiran politik Islam berdasarkan literatur-literatur otoritatif sejarah pemikiran politik Islam.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka penulisan kajian kepustakaan singkat ini bermaksud untuk mendeskripsikan konseptualisasi dan aktualisasi penggunaan metodologi pendekatan interpretatif dalam kajian pemikiran politik Islam (secara spesifik difokuskan terhadap kajian dan analisis tentang sosialisme Islam). Metode adalah cara yang dipilih oleh peneliti untuk melaksanakan interpretatif agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sebagai cara kerja yang bersistem, tujuannya tidak lain adalah mempermudah pelaksanaan penelitian. Metode merupakan pelengkap ilmu yang berperan sebagai alat yang spesifik untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam kajian yang diteliti.¹⁰ Kajian dalam penelitian ini termasuk dalam bidang kajian Ilmu Politik, secara lebih fokus dalam konsentrasi keilmuan tentang pemikiran politik Islam.

KERANGKA TEORI PENDEKATAN INTERPRETATIF

⁸ Andrew Heywood. *Ideologi Politik Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016. Halaman: 19.

⁹ John B. Thompson. *Analisis Ideologi Dunia; Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia...* Halaman: 21.

¹⁰ M. E. Patterso dan D. R. Williams. *Collecting and Analyzing Qualitative Data: Hermeneutic Principles, Methods, and Cases Examples*. Champaign, Illionis: Sagamore Publishing. 2002. Halaman: 38.

Konseptualisasi pendekatan interpretasi didasarkan pada argumen tentang tak terhindarkannya peran interpretasi, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Marsh bahwa itu berkaitan erat dengan argumen yang menentang kemungkinan suatu ilmu tentang politik. Orang bertindak berdasar keyakinan dan preferensi mereka, namun kita tidak mempunyai bukti eksternal tentang keyakinan itu. Jadi, ketika kita mencoba menjelaskan hubungan antara keyakinan dan tindakan, tidak ada keniscayaan kausatif terhadap hubungan itu yang sepadan dengan penjelasan yang ditemukan dalam ilmu alam. Namun, kita masih dapat menjelaskan tindakan sosial: kita dapat melakukannya dengan menunjuk pada hubungan kondisional dan berubah-ubah antara keyakinan, keinginan, maksud, dan tindakan. Jadi, studi politik mengandalkan bentuk penjelasan naratif. Kita memaparkan tindakan, praktik, dan institusi dengan menceritakan suatu kisah tentang bagaimana mereka dapat menjadi seperti itu dan barangkali juga tentang bagaimana semua itu dipelihara. Jadi, narasi bagi studi politik itu seperti halnya teori bagi ilmu alam. Meskipun narasi mungkin mempunyai urutan kronologis dan berisikan unsur-unsur seperti karakter, tindakan, dan peristiwa, ciri yang menentukan adalah bahwa mereka menjelaskan tindakan menggunakan keyakinan dan preferensi. Oleh karena itu, mempelajari politik dengan mengandalkan pada struktur naratif akan sama dengan yang ditemukan dalam karya fiksi. Namun, kisah yang diceritakan oleh ilmu manusia bukanlah karya fiksi. Perbedaan antara keduanya bukan dalam penggunaan narasi, melainkan dalam hubungan antara struktur naratif dan pengetahuan objektif kita tentang dunia.¹¹

Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Marsh tersebut di atas, maka menurut Thompson metodologi interpretatif dalam membuat analisis bentuk-bentuk simbol akan sangat tepat jika dikonseptualisasikan berdasarkan kerangka metodologi yang disebut dengan 'hermeneutika mendalam'. Kerangka ini menyoroti kenyataan bahwa obyek analisisnya adalah konstruksi simbol penuh makna yang menuntut dilakukannya interpretasi. Karena itu kita harus memberikan peran sentral pada proses interpretasi, karena hanya dengan cara ini kita dapat menilai karakter pembeda domain obyek. Tapi bentuk-bentuk simbol juga terkandung dalam konteks sosial dan historis yang berbeda-beda; dan sebagai konstruksi simbol yang penuh makna, secara internal bentuk-bentuk simbol tersebut terstruktur dengan cara yang bermacam-macam. Selain memahami kontekstualisasi sosial bentuk-bentuk simbol serta ciri struktur internalnya, kita harus menggunakan metode analisa yang lain.¹²

¹¹ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 162.

¹² John B Thompson. *Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa...* Halaman: 371.

Thompson menjelaskan bahwa telah mengembangkan sebuah kerangka metodologi yang memungkinkan proses interpretasi/re-interpretasi dianggap sebagai sebuah prosedur yang komplek yang diprantarai oleh berbagai fase analisa yang berbeda, fase yang disebutnya dengan analisa sosial-historis dan analisa formal diskursif. Lebih lanjut, menurutnya ketika menawarkan sebuah interpretasi berarti kita membuat suatu pernyataan yang mengandung resiko dan terbuka untuk dipertentangkan. Ketik menawarkan sebuah interpretatif berarti kita menempatkan diri kita pada satu garis; kita membangun suatu pernyataan yang kan kita bela dan kita pertahankan dengan berbagai cara. Kita tidak harus mengandaikan bahwa ia sesuatu yang dapat dibenarkan, yaitu bahwa ia akan dibenarkan jika kita melakukan itu dengan benar (*justifiable*).¹³

Memang terdapat beberapa acara berbeda sebagai upaya menjustifikasi pernyataan kita. Bagaimana kita melakukan hal tersebut, jenis bukti dan argumen seperti apa yang akan kita gunakan, semuanya akan bergantung pada beberapa faktor, seperti dasar umum penelitian dan contoh kasus dari suatu pernyataan. Buka sesuatu yang mudah dan tidak akan membantu mencoba memetakan berbagai kemungkina itu di sini. Namun kita dapat menyimpulkan dari berbagai perbedaan yang ada dan bertanya apakah terdapat beberapa kondisi umum yang harus dipenuhi untuk dapat membenarkan suatu pernytaan. Ini adalah pertanyaan yang ada dalam pikiran yang dijadikannya sebagai tesis berikut: dalam menganggap suatu interpretasi itu *justifiable*, hendaknya ia dibenrakan dengan cara tidak dipaksakan. Menurutny, dengankata lain, terdapat perbedaan antara membenarkan sebuah interpretatif atau memaksakannya, atau memaksakan interpretatif tersebut ke dalam diri kita. Menjaustifikasi berarti memberikan lasan, latar belakang, bukti, penjelasan; memaksakan berarti menuntut dan mendorong orang lain untuk menerimanya, untuk tidak meragukan atau diam dalam perbedaan pendapat. Menjustifikasi berarti memperlakukan yang lain sebagai individu yang dapat dipercayai; memaksakan berarti memperlakukan yang lain sebagai individu yang harus dipersoalkan.¹⁴

Perbedaan ini menandakan bahwa suatu interpretatif dapat dibenarkan hanya jika ia dapat dijustifikasi dengan tanpa paksaan, yaitu hanya dapat dijustifikasi di bawah kondisi yang memasukkan penyensoran terhadap relasi kekuasaan yang asimetris. Menurutny disebut sebagai kondisi *the principle of non-imposition*. Ini adalah prinsip yang menegaskan salah satu kondisi formal yang di situ interpretasi tersebut dapat dijustifikasi. Ia menegaskan kondisi yang dibutuhkan sekalipun bukan satu-satunya. Kondisi tersebut bukan satu-satunya karena tidak

¹³ John B Thompson. *Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa...* Halaman: 343.

¹⁴ John B Thompson. *Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa...* Halaman: 343.

mampu memberikan kriteria khusus yang dimaksudkan, jenis bukti dan argumen tertentu dapat berbeda dari satu bidang penelitian dengan bidang penelitiannya lainnya; sesuatu yang dianggap relevan atau sebagai bukti yang cukup dalam satu konteks dapat menjadi sesuatu yang tidak relevan dan bukan sebagai bukti yang cukup dalam konteks yang lain. Namun kenyataannya, kriteria, bukti dan argumen yang kita gunakan dalam upaya menjustifikasi sebuah interpretasi yang dapat berbeda berdasarkan konteks penelitiannya tidak menyiratkan bahwa seluruh upaya justifikasi tidak lebih dari sekedar tindakan arbitrer.¹⁵

Aspek-aspek lain teori interpretatif adalah secara tepat dapat diterapkan pada tindakan. Model analisa struktural dapat diperluas melampaui wilayah ilmu bahasa dan seluruh fenomena sosial yang dapat disebut dengan karakter semiologis yang dikarakterisasikan dengan istilah sistem tanda yang saling berhubungan. Perpanjangan model analisis ini memberikan ilmu-ilmu sosial satu bentuk penjelasan yang betul-betul berbeda dari apa yang dinyatakan dalam pemikiran Humean tentang kausalitas. Bagi kalangan strukturalis penjelasan menempati relasi-relasi yang korelatif daripada konsekutif atau sekuensial. Ricoer berpendapat bahwa mapananya korelasi tersebut tidak berarti menggeser tugas interpretasi: ini sekedar fase awal interpretasi yang mendalam tentang fenomena sosial.¹⁶

Thompson menjelaskan bahwa penelitian tentang adanya korelasi-korelasi dengan dan antara fenomena sosial sebagai entitas semiotik akan kehilangan arti dan ketertarikannya jika tidak menghasilkan sesuatu seperti satu pemaknaan semantik yang mendalam. Pada saat yang sama sebagaimana permainan –bahasa merupakan bentuk kehidupan, berdasarkan aforisme terkenal Wittgenstein, struktur sosial juga berusaha mengatasi kegamangan eksistensial, kesulitan manusia dan sumber-sumber konflik yang mendalam. Dalam pemahaman ini, struktur-struktur tersebut memiliki dimensi referensial. Struktur-struktur itu akan menunjukkan ketidakpastian (*aporias*) eksistensi sosial, ketidakpastian yang di situ terdapat pemikiran kritis mengendap.¹⁷

VARIAN PENDEKATAN INTERPRETATIF

Menurut pendapat Marsh pendekatan interpretatif sering bermula dari pandangan bahwa untuk memahami aksi, praktik, dan institusi, kita harus memahami makna, keyakinan, dan preferensi orang-orang yang terlibat. Pendekatan ini bukanlah hal yang baru dalam studi politik. Menurut Marsh, ketika studi politik mulai berkembang dan terpisah dari disiplin lain, perhatian terhadap makna menjadi berkaitan dengan *hermeneutika* dan *etnologi*. Yang lebih terkini, filsafat

¹⁵ John B Thompson. *Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa...* Halaman: 345.

¹⁶ John B Thompson. *Analisis Ideologi Dunia; Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia...* Halaman: 263-264.

¹⁷ John B Thompson. *Analisis Ideologi Dunia; Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia...* Halaman: 264.

post-strukturalis dan *pos modern* telah menginspirasi jenis-jenis interpretasi yang lain. Dua bentuk interpretasi yang terakhir ini mengubah fokus kita dari individu dan pikiran menuju sistem tanda dan bagaimana mereka berfungsi dalam masyarakat.¹⁸

Ada beberapa definisi tentang hermeneutika. Para ahli merumuskan dan memberikan ciri-ciri sesuai dengan konteks penggunaan hermeneutika. Paul Ricoeur mendefinisikan hermeneutika sebagai peralihan antara refleksi abstrak dan refleksi konkret. Sedangkan, Boeckhlewat mendefinisikan hermeneutika sebagai “*the scientific methodology of the study of what is known already*”. Hermeneutika dilihat sebagai kajian metodologi ilmiah terhadap apa yang sudah ada. Misalnya, metodologi sintifik filologi ataupun kajian saintifik metode-metode yang menerangkan makna dari suatu teks; sedangkan para ahli bahasa melihat hermeneutika sebagai makna dari karya sastra pada masa tertentu.¹⁹ Hermeneutika adalah studi tentang jenis memahami yang merupakan perjumpaan historis. Hermeneutika berupaya memadukan dua area teori pemahaman: persoalan apa saja yang terkandung dalam kejadian memahami sebuah teks, dan pertanyaan apakah sesungguhnya memahami itu sendiri, dalam pengertiannya yang paling mendasar dan paling “eksistensial”. Hermeneutika adalah suatu aliran pemikiran di Jerman sehingga hermeneutika sangat dipengaruhi oleh fenomenologi Jerman dan filsafat eksistensial. Dan, tentu saja, pentingnya hermeneutika bagi interpretasi sastra di Amerika diperkuat dengan diterapkannya pemikiran semacam itu pada persoalan interpretasi teks.²⁰

Karena sejarahnya yang panjang itu dan keanekaragaman objeknya serta perbedaan pendapat pakar-pakarnya, maka definisi hermeneutika pun, sebagaimana objek bahasannya, berbeda-beda pula. Ada yang menyatakan bahwa hermeneutika adalah *Ilmu penafsiran Kitab suci*, atau *Ilmu penafsiran teks*, ada lagi yang merumuskannya sebagai *Kaidah-kaidah pemahaman teks*, atau *Metode menghindari kesalahfahaman*, dan lain-lain. Dalam bahasan mereka, ada yang menekankan pada tujuan penulis teks, ada juga yang pada pemahaman penakwil/peneliti teks, ada lagi yang menyatakan adanya makna tertentu dan final bagi sebuah teks, sementara yang lain membuka lebar pintu pemahaman bagi masing-masing tanpa akhir, dengan alasan perbedaan latar belakang, dan keanekaragaman situasi masing-masing penakwil teks. Lebih lanjut, menurut Shihab sementara pakar membagi hermeneutika dalam tiga ragam. *Pertama*, teori hermeneutika yang menitikberatkan bahasannya pada metodologi. *Kedua*, filsafat hermeneutika yang fokus bahasannya adalah menelusuri status ontologis dari upaya pemahaman (memahami). *Ketiga*,

¹⁸ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 163.

¹⁹ Darmiyati Zuchdi dan Wiwiek Afifah. *Analisis Konten, Etnografi & Grounded Theory, dan Hermeneutika dalam Penelitian...*, Halaman: 189.

²⁰ Richard E. Palmer. *Hermeneutika: Teori Interpretasi dalam Pemikiran Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, dan Gadamer*. (Terjemahan: Stephanus Aswar Herwinarko). Yogyakarta. IRCiSoD. 2022. Halaman: 36.

hermeneutika kritis yang menekankan bahasannya menyangkut upaya membuka penyebab-penyebab distorsi dalam pemahaman.²¹

M. Quraish Shihab, menjelaskan bahwa paling tidak ada empat aliran hermeneutika: Aliran konvensional atau klasik; Aliran—yang diperkenalkan oleh sementara pakar sebagai—moderat; Aliran ekstrem; dan Aliran kritis. Penjelasan tentang aliran kritis menurut Shihab bahwa aliran ini dipelopori oleh Jurgen Habermas (Lahir 1929 M) yang menyatakan bahwa melalui pengamatan kritis, penafsir/penakwil akan mampu menjadi lebih sadar dan dengan demikian dia akan lebih berhasil memelihara diri dari tumpukan pengaruh ideologi, budaya dan adat istiadat masyarakat yang memengaruhi sang penafsir/penakwil. Hanya saja, dalam pandangan Habermas, keterbebasan dari hal ini sering kali tidak wujud dalam kenyataan.²²

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut di atas, bahwa pendekatan interpretatif memiliki berbagai macam varian, oleh karena itu melalui kajian kepustakaan akan dilakukan pembahasan secara singkat karakteristik dan penjelasan teoritis terhadap masing-masing varian sebagai berikut:

Hermeneutika dan Etnologi

Pada permulaan abad ke-20, suatu bentuk positivisme analitis dan atomistik semakin mendominasi filsafat Anglo-Amerika. Biasanya jenis positivisme ini membantu menginspirasi suatu ilmu sosial behavioris dengan tidak banyak ketertarikan terhadap keyakinan dan makna. Para filosof yang mewarisi jubah idealis akhir abad ke-19, dan mereka yang kembali ke tradisi kontinental seperti fenomenologi, memberikan alternatif utama terhadap positivisme. Para idealis seperti Michael Oakeshott dan R. G. Collingwood memilih pendekatan hermeneutik terhadap sejarah, dan dengan perluasan terhadap ilmu pengetahuan manusia secara keseluruhan. Fenomenologi mengilhami para sosiolog dan antropolog yang ingin memahami makna yang diletakkan orang pada tindakan sosial dalam masyarakatnya sendiri atau masyarakat lainnya. Ini menghasilkan etnologi Peter Berger, Thomas Luckman, dan Clifford Geertz.²³

Hermeneutika adalah teori interpretatif. Teori ini awal mulanya dikembangkan oleh masyarakat Yunani. Saat itu teks-teks kuno injil tidak mudah dipahami sehingga dewa Hermes datang membantu untuk untuk menafsirkannya. Peran dewa Hermes inilah yang

²¹ M. Quraish Shihab. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Quran*. Tangerang, Lentera Hati. 2013. Halaman: 343.

²² M. Quraish Shihab. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Quran...* Halaman: 343-344.

²³ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 163-164.

disebut sebagai penafsir. Artinya, kahidarnnya untuk menafsirkan dan menyikap makna-makna yang belum dipahami oleh masyarakat sehingga menjadi lebih mudah dan tidak multi tafsir. Dengan upaya inilah, masyarakat menjadi lebih mudah memahami kandungan kitab injil (*Bible*).²⁴

Sebagai sebuah metode penafsiran, hermeneutika terdiri atas tiga bentuk atau model. *Pertama*, hermeneutika objektif yang dikembangkan tokoh-tokoh klasik, khususnya Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, dan Emilio Betti. Menurut model ini, penafsiran berarti memahami teks sebagaimana yang di pahami pengarangnya, sebab apa yang disebut teks adalah ungkapan jiwa pengarangnya, sehingga apa yang disebut makna atau tafsiran atasnya tidak didasarkan atas kesimpulan pembaca melainkan diturunkan dan bersifat instruktif.²⁵ *Kedua*, hermeneutika subjektif yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh modern khususnya Hans-Georg Gadamer dan Jacques Derida. Menurut model ini, hermeneutika bukan usaha menemukan makna objektif yang dimaksud si penulis seperti yang diasumsikan model hermeneutika objektif melainkan memahami apa yang tertera dalam teks itu sendiri.²⁶ *Ketiga*, hermeneutika pembebasan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh Muslim kontemporer khususnya Hasan Hanafi dan Farid Esack. Menurut model ini, hermeneutika tidak hanya berarti ilmu interpretasi atau metode pemahaman tetapi lebih dari itu adalah aksi.²⁷

Hermeneutika muncul dalam tradisi kesarjanaan Bibel. Namun, ia akhirnya menjadi istilah untuk teori tentang pemahaman, khususnya menafsirkan teks dan aksi (Baunman 1978; Gadamer 1979). Jadi, ia tumpang-tindih dengan suatu kepentingan dalam sejarah gagasan (seperti dalam contoh dari Collingwood 1993 dan Oakeshott 1962, 1975). Biasanya, para teoritis hermeneutika menyelidiki sifat eksistensial pemahaman, sambil mengakui bahwa ia melekat dalam tradisi. Satu contoh spesifik, Collingwood menyatakan bahwa semua sejarah adalah 'gagasan', sedanagkan gagasan adalah serangkaian jawaban terhadap pertanyaan spesifik yang muncul dalam suatu gagasan historis spesifik yang diterima apa adanya (*taken for granted*). Oakeshott menegaskan, berlawanan dengan kaum rasionalis dan positivis, bahwa pengetahuan politik hanya bisa muncul dari sejarah. Aktivitas politik harus dijelaskan oleh kebijaksanaan dan kalim

²⁴ Darmiyati Zuchdi dan Wiwiek Afifah. *Analisis Konten, Etnografi & Grounded Theory, dan Hermeneutika dalam Penelitian*. Jakarta. PT Bumi Aksara. 2019. Halaman: 187.

²⁵ Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics*, (London; Routledge & Kegan Paul, 1980). Halaman: 29.

²⁶ K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, (Jakarta: Gramedia, 1981). Halaman: 225.

²⁷ Hasan Hanafi, *Liberalisasi, Revolusi, Hermeneutik*. Terjemahan: Jajat Firdaus. Yogyakarta: Prisma. 2003. Halaman: 109.

moral dalam tradisi perilaku yang relevan. Visi besar W. H. Greenleaf tentang politik Inggris pada abad ke-20 merupakan suatu penerapan secara sadar atas teori hermeneutika Oakeshott. Greenleaf mengikuti jejak kebangkitan kolektivisme, ketegangan ideologi yang kemudian mengelilingi pertumbuhan pemerintahan dan dampak pertumbuhan semacam itu terhadap sistem politik. Ia bergerak keluar dari isyarat suatu tradisi menuju praktik dan institusi yang dihasilkannya.²⁸

Edmund Husserl, pelopor filsafat fenomenologi, menyatakan bahwa dunia kehidupan pandangan awam sehari-hari (*life world of everyday common sense*) menjadi dasar bagi pengalaman apa yang mungkin. Adapun para teoritis yang belakangan, menyatakan bahwa pengetahuan akal-sehat (*common sense knowledge*) kita selalu tidak lengkap dan tak tetap. Kita bahkan hanya menguasai ilmu pengetahuan semacam itu untuk sementara waktu saja. Proses sosial yang berlangsung terus-meneruslah yang menghasilkannya. Jadi, etnologi berfokus pada bentuk berbeda dari ilmu pengetahuan akal-sehat dan penalaran kritis yang terjadi dalam konteks sosial beraneka ragam. Hal ini bersinggungan terutama dengan para sosiolog dan antropolog, dan untuk memperluas definisi singkat ini, Marsh mencoba memaparkan karya antropolog Clifford Geertz (1973) sebagai berikut:²⁹

Menurut Clifford Geertz, manusia itu tergantung dalam jaringan makna yang telah mereka rajut. Para antropolog mempraktikkan etnologi untuk menemukan rajutan makna yang relevan. Mengerjakan etnografi adalah melibatkan teknik seperti memilih informan, mencatat transkrip, dan menyimpan catatan lapangan. Yang lebih penting lagi, etnografi adalah tentang 'deskripsi padat'; tentang menjelaskan 'bangunan pikiran kita sendiri tentang bangunan pikiran orang lain tentang apa yang telah mereka dan rekan sebangsanya lakukan.

Berdasarkan definisi tersebut, Marsh menjelaskan bahwa dengan istilah keseharian, ia memandang sesuatu dari sudut pandang orang lain. Para etnografer memberikan interpretasi mereka sendiri tentang apa yang dilakukan informan, dan catatan-catatan ini hanyalah interpretasi lapis kedua—atau bahkan—lapis ketiga.³⁰ Lanjut, Marsh menyebutkan kalau deskripsi etnografis mempunyai empat ciri utama: ia bersifat interpretatif; ia menafsirkan arus awacara sosial; ia menuliskan wacana tadi dengan mencatatnya; dan ia bersifat mikroskopis. Ia adalah suatu ilmu yang ringan (*soft science*).

²⁸ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 164.

²⁹ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 164-165.

³⁰ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 165.

Ia menerka makna, menilai terkaan, dan mengambil kesimpulan penjas dari terkaan yang lebih baik. Namun, ia masih dimungkinkan untuk menggeneralisir. Teori memberikan suatu kosakata untuk mengungkapkan apa yang hendak dikatakan aksi simbolik. Ia bukan tentang prediksi. Teori harus 'membangkitkan interpretasi yang kuat tentang realitas masa lalu; ia harus menyelamatkan realitas yang akan datang'. Jika ilmu-ilmu eksperimental adalah tentang deskripsi dan penjelasan, etnografi adalah tentang prasasti (atau deskripsi padat) dan spesifikasi (atau diagnosa klinis). Dengan demikian, tugasnya menentukan makna yang dimiliki tindakan tertentu itu bagi aktor sosial, dan kemudian mengungkapkan apa yang dinyatakan oleh deskripsi padat ini kepada kita tentang masyarakat tempat mereka temukan. Dan analisa ini selalu tidak lengkap. Bahkan, seorang etnografer tidak akan pernah sampai kepada dasar segala sesuatu. Maka, etnografi adalah suatu ilmu yang lebih ditandai oleh perbaikan debat dibanding oleh sesuatu penyempurnaan konsensus. Yang lebih baik adalah ketelitian yang menjadikan kita saling menyakiti satu sama lain.³¹

Pos-strukturalisme dan Posmodernisme

Filsafat pos-strukturalis dan posmodernisme telah menghasilkan jenis-jenis teori interpretatif baru. Meski pendekatan baru ini memberikan tantangan kuat terhadap harapan ilmiah para teoritis behavioris dan *rationalis choice*, para penganjur alternatif hermeneutika dan etnografi tidak musti selalu dapat menyebutnya. Label pos-strukturalis dan posmodernis merujuk pada berbagai ragam teoritis yang menantang fundasionalisme dalam filsafat dan ilmu kemanusiaan. Termasuk di antara mereka adalah Jacques Derrida (1976), Michel Foucault (1977, 1986), Jacques Lacan (1977), Jean-Francois Lyotard (1984), Richard Rorty (1980), dan Hayden White (1973, 1987). Sayangnya, perbedaan yang jelas di antara mereka menjadikan label ini tidak bisa tunggal. Banyak di antara para pakar ini yang telah meninggalkan label ini bagi karya mereka. Jadi, di sini kita hanya bisa mencoba memberikan pada pembaca sebuah perasaan teori interpretatif yang diinspirasi oleh pos-strukturalisme dan posmodernisme, dan bukannya memberikan definisi yang otoritatif.³²

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang varian pendekatan interpretatif ini, Marsh melakukan pencermatan lebih dalam terhadap karya Foucault. Seperti sebagian besar penganut pos-strukturalis dan posmodernis, Foucault memusihi klaim keagungan yang menjadi ciri pokok proyek modern. Proyek ini menuntut untuk menyandarkan pengetahuan dan etika kita di atas fondasi objektif dan esensial. Biasanya, hal ini dilakukan dengan bersandar pada

³¹ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 165.

³² David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 166.

pengalaman murni tentang dunia ataupun pada sifat murni subjektivitas manusia. Dalam melakukan demikian, ia bergantung pada posisi lain tentang, katakan, sifat transparan bahasa dan sifat progresif sejarah manusia. Pertanyaan tentang seberapa akurat menyamakan modernitas dengan klaim dan posisi seperti itu, tidak menjadi perhatian kita disini. Namun, kita mencermati analisis pos-strukturalis dan posmodernis tentang keniscayaan batas proyek modern ini. Karya Foucault menunjukkan suatu permusuhan terus-menerus terhadap dua konsep modern: subjek dan nalar.³³

Permusuhan Foucault terhadap proyek modern menggiringnya untuk mengadopsi suatu pendekatan interpretatif terhadap kehidupan sosial. Dalam menentang pengalaman murni, ia menyatakan bahwa kita mempunyai pengalaman hanya dalam suatu wacana sebelumnya. objek dan tindakan memerlukan makna, menjadi nyata, hanya ketika mereka mempunyai suatu tempat dalam suatu bahasa, suatu jaringan makna yang lebih luas. Jadi, untuk memahami suatu objek atau tindakan, para mahasiswa politik harus menafsirkannya dalam wacana lebih luas yang ia menjadi bagian di dalamnya. Kehidupan manusia hanya dapat dipahami dalam suatu episteme atau kerangka makna, dan kerangka makna ini tidak dapat direduksi menjadi suatu proses atau struktur objektif. Wacana tidak bisa dihilangkan sebagai suatu refleksi pasif kekuatan sosial atau ekonomi: kelas sosial atau sarana produksi tidak menentukannya. Namun, Foucault tidak menyicil memberikan peran signifikan bagi agensi manusia dalam membangun wacana semacam itu. Namun, ia menyatakan bahwa mereka berkembang secara acak sebagai hasil waktu dan kesempatan. Tidak ada logika kosmik, tidak ada kekuatan raksasa sejarah yang impersonal, yang memungkinkan kita memahami suatu wacana dari pengetahuan kita tentang logika atau sejarah tersebut. Apa para mahasiswa politik harus menafsirkan objek dan tindakan dalam keadaan historis mereka yang tertentu.³⁴

Dalam tulisannya, Foucault kadangkala menyatakan bahwa suatu episteme membangun makna atau objek tertentu dari suatu era tertentu. Namun, bahkan di sini pun makna tidaklah tetap. Episteme hanya membatasi makna tertentu yang ditemukan di dalamnya. Selain itu, dalam karyanya yang lebih belakangan, Foucault beralih dari gagasan tentang episteme menuju gagasan tentang praktik diskursif. Suatu wacana terdiri dari makna yang berlipat-lipat tanpa batas, banyak pernyataan dan peristiwa, tak satu pun yang stabil, tak satu pun yang membuat institusi. Dari perspektif pos-strukturalis, kunci untuk memahami suatu praktik sosial bukanlah sifat legal-formalnya—misalnya, hukum tentang pernikahan dan hubungan seksual—atau sifat objektif mereka yang terlibat—misalnya, latarbelakang pendidikan dan pekerjaan individu. Akan

³³ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 166.

³⁴ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 167.

tetapi, sifat-sifat ini, seperti halnya praktik itu sendiri, hanya dapat dipahami sebagai bagian dari sekumpulan makna yang menjadikan mereka mungkin. Misalnya, Foucault menyatakan bahwa negara modern mempunyai ciri berupa caranya menyatukan konsep kedaulatan, disiplin, dan pelayanan.³⁵

Lebih lanjut, dalam pandangan Marsh menegaskan bahwa nyata bedanya pendekatan interpretatif Foucault banyak bersumber dari permusuhannya terhadap subjek dan nalar. Mulanya, permusuhannya terhadap subjek berarti bahwa ia menekankan cara yang digunakan rezim kekuasaan dan episteme untuk membangun individu dan keyakinan mereka. Foucault menolak gagasan tentang suatu subjek yang otonom: yakni, subjek tidak mempunyai landasan sendiri atau pengalaman yang penuh makna, penalaran, keyakinan, dan tindakan di luar konteks sosial. Demikian juga, ia menolak visi sejarah Marxis dan Hegelian sebagai mengejawantahkan subjek. Bagi Foucault, subjek adalah suatu hasil tak terpisahkan dari wacana tertentu, suatu rangkaian teknik pengaturan dan teknologi diri. Jadi, ia menekankan pada wacana, bukan pada keyakinan. Selain itu, permusuhan Foucault terhadap nalar berarti bahwa ia tidak berpusat pada beberapa wacana untuk menunjukkan bagaimana wacana-wacana tersebut muncul dari lebih atau kurang interaksi acak dari manusia jenis praktik-mikro. Dalam karya berikutnya, ia menolak gagasan tentang hubungan struktural, keperluan karakteristik, atau suatu perkembangan logika yang sedang memrintah praktik sosial. Negara modern, misalnya, ditimbulkan dengan penyesuaian berbagai-macam tehnik—sebagaimana kekuasaan kepasturan gereja—yang jelas-jelas tidak integral dengan Negara.³⁶

KARAKTERISTIK PENDEKATAN INTERPRETATIF

Pendekatan interpretatif tentu memiliki kekhususan yang dapat membedakannya dari pendekatan-pendekatan yang lainnya. Oleh karena itu, Marsh menyebutnya bahwa pendekatan interpretatif ini merupakan suatu pendekatan anti foundational untuk interpretasi dengan menunjukkan bagaimana karakteristik-karakteristik yang menjadi pembeda atau penanda utama dari pendekatan tersebut berbagai macam interpretatif di bawah *heading* umum yaitu: subjektivitas, rasionalitas, dan positivisme.³⁷ Pembahasan singkat masing-masing karakteristik pendekatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Subjektivitas

Beberapa teori interpretatif mengasumsikan subjek otonom yang berpikir dan bertindak semata-mata menurut nalar dan perintah dirinya sendiri. Kaum post-strukturalis dan posmodernis

³⁵ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 167.

³⁶ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 167-168.

³⁷ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 168-172.

menentang ide semacam ini. Namun, penolakan terhadap otonomi tidak harus disertai pula dengan penolakan terhadap *agensi* (perantara). Menyangkal bahwa subjek dapat lolos dari semua pengaruh sosial, bukanlah berarti mengingkari bahwa subjek tersebut dapat bertindak secara kreatif demi pertimbangan yang masuk akal bagi mereka. Sebaliknya, kita menerima agensi hanya jika kita tidak dapat memisahkan dan membedakan keyakinan dan tindakan dengan merujuk (referensi) pada konteks sosial mereka semata. Orang yang berbeda akan mempunyai keyakinan yang berbeda, dan melakukan tindakan yang berbeda—terhadap latar belakang struktur sosial yang sama. Jadi, pasti ada suatu ruang dalam struktur sosial, di mana individu subjek memutuskan keyakinan apa yang akan dipegang, dan tindakan apa yang akan dilakukan sesuai dengan pemikiran dan alasan mereka sendiri. Individu dapat menalar secara kreatif, dengan cara yang tidak kaku ataupun dibatasi oleh konteks sosial atau wacana tempat mereka berada. Kita sepakat dengan pemikir pos-strukturalis dan posmodernis, bahwa subjek memahami semesta dengan cara-cara yang niscaya tergantung pada pengaruh struktur sosial terhadap mereka. Meski demikian, kita harus memberi ruang bahwa subjek mempunyai kemampuan untuk memilih keyakinan dan tindakan tertentu—bahkan yang baru sekalipun—yang mungkin bisa mengubah struktur sosial yang ada. Pandangan tentang agensi ini mendorong kita untuk melihat struktur sosial bukan sebagai episteme, bahasa, atau wacana, melainkan sebagai tradisi. Konsep episteme, bahasa, dan wacana, biasanya mengisyaratkan struktur sosial yang mengatur tindakan individu, dan eksis secara independen (berdiri sendiri) dari tindakan-tindakan tadi. Sebaliknya, gagasan tentang tradisi mengisyaratkan bahwa struktur sosial merupakan kanvas tempat subjek terlahir, yang kemudian bertindak sebagai latar belakang keyakinan dan tindakan individu tersebut di kemudian hari, tanpa mengatur atau menentukannya. Tradisi membuka kemungkinan subjek menyesuaikan diri, mengembangkan, dan barangkali bahkan menolak, sebagian besar warisannya.³⁸

Kami memandang tradisi sebagai satu himpunan teori atau narasi, dan praktik-praktik berkaitan itu yang diwarisi demikian masyarakat, dan membentuk dasar bagi mereka untuk mencapai keyakinan dan melakukan tindakan. Tradisi itu selalu bergantung, selalu berubah, dan pasti berbeda dalam suatu konteks historis. Tradisi diturunkan dari generasi ke generasi, baik berupa dari orang tua kepada anak dalam keluarga; ataupun dari senior ke pekerja magang dalam organisasi dan jaringan. Tradisi biasanya tersusun dari keyakinan dan praktik yang disampaikan oleh guru kepada murid, dan seterusnya. Selain itu, tradisi tidaklah tetap atau

³⁸ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman:168-170.

statis, sehingga kita hanya dapat mengidentifikasi contoh kasus yang menyusun setiap tradisi, dengan melacak kembali hubungan historis yang tepat.³⁹

Rasionalitas

Analisis kita tentang tradisi, sangat berbeda dengan analisis sebelumnya, yang biasanya melibatkan suatu bentuk kekeliruan kaum esensialis: yakni, mereka menyamakan tradisi dengan ciri-ciri (karakteristik) yang kaku dan tetap. Mereka kemudian mengidentifikasi variasi-variasi dari karakteristik ini. Akibatnya, bagian esensial (mendasar) dari sebaran tradisi niscaya hadir dalam setiap perkataan atau perbuatan penganutnya. Di lain waktu, tradisi dianggap mempunyai suatu logika perkembangan internal, sehingga prinsip-prinsip dalam suatu tradisi menentukan penggunaannya. Kita menganggap tradisi sebagai sesuatu yang kontingan (tergantung): yakni, orang menghasilkan tradisi tersebut melalui tindakan mereka sebagai agen. Oleh karena itu, untuk memahami muatan dan hakikat sebuah tradisi, para pengkaji ilmu politik membedahnya. Suatu studi pembedahan terhadap tradisi, praktik, ataupun institusi adalah membongkar proses bagaimana mereka diciptakan, dipertahankan, dan dimodifikasi melalui keyakinan, preferensi, dan tindakan individu dalam banyak kancan. Studi politik misalnya, harus mengkaji topik selain negara, yakni menyelidiki tema seperti irigasi, kawat telegraf, sekolah, manajemen resiko, dan membangun rasa percaya diri. Hal ini harus dilakukan karena wacana dan praktik yang menjadi penentu dalam masyarakat timbul dari praktik-praktik mikro ini. Kiat harus mendefinisikan ulang tradisi secara non-esensial, membedah, untuk menghindari bercokolnya pengaruh nalar objektif.⁴⁰

Namun demikian, lantaran gagasan tentang tradisi menyatakan bahwa subjek dapat mengubah warisan tradisinya menurut alasan yang masuk akal bagi mereka, hal ini juga mendorong kita untuk menghindari dari penolakan kaum pos-strukturalis terhadap kebenaran atau nalar objektif. Di sini kita harus bergulat dengan sifat dan efek penalaran lokal. Meski penolakan terhadap subjek otonom telah mencegah keyakinan tentang suatu nalar yang netral atau universal, fakta tentang agensi memungkinkan kita untuk menerima penalaran lokal—meski dengan cara Foucault enggan melakukannya. Bahkan para filsuf yang menolak kemungkinan pengalaman murni dan adanya kebenaran niscaya, cenderung berisikeras bahwa perhatian terhadap konsistensi adalah ciri wajib dari semua jaringan keyakinan. Orang mencoba mengorganisir keyakinan agar sesuai secara konsisten dengan gagasannya sendiri tentang keyakinan terbaik.⁴¹

³⁹ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 170.

⁴⁰ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 170-171.

⁴¹ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 171.

Para peneliti ilmu politik tidak memahami perubahan dalam tradisi, mentalitas, atau wacana, kecuali jika mereka menghubungkannya dengan alasan orang melakukannya. Tradisi tidak mengandung suatu logika inherent yang menentukan perkembangannya: tidak ada kekuatan pemaksa yang mendorong individu untuk mengubah keyakinan dan tindakannya. Alih-alih, kami berpendapat bahwa orang mengubah keyakinan atau tindakannya dalam cara yang tergantung pada penalaran lokal. Kita tidak dapat memotret semacam perubahan seperti itu sebagai kejadian murni acak dan sebarang (arbitrer), ataupun sebagai sesuatu yang bisa dijelaskan seperti halnya fakta sosial objektif. Perubahan adalah terjadi sebagai jawaban terhadap dilema. Suatu dilema muncul bagi seorang individu atau institusi ketika sebuah gagasan baru muncul bertentangan dengan gagasan yang telah ada, sehingga memaksa pertimbangan ulang. Oleh karena kita tidak dapat mencerabut keyakinan dan tindakan individu dari fakta sosial objektif tentang mereka, kita dapat memahami bagaimana praktik sosial yang mereka hasilkan berubah hanya dengan mengeksplorasi cara-cara bagaimana mereka terbentuk—dan menjawab terhadap—dilema.⁴²

Relativisme

Ketika kita menerima adanya penalaran lokal, kita bisa menjawab tuduhan yang sering dilontarkan relativisme dan irasionalisme terhadap pos-strukturalisme dan posmodernisme. Meski kita tidak mempunyai akses terhadap fakta murni yang adapt kita gunakan untuk menyatakan bahwa interpretasi dan narasi tertentu itu benar atau salah, kita masih bisa bergantung pada gagasan objektivitas. Kita dapat mendefinisikan objektivitas dalam pengertian antropologis dengan memanfaatkan kriteria perbandingan. Jadi, kita memutuskan satu narasi itu lebih baik daripada lainnya karena ia paling memenuhi kriteria seperti: akurasi, kelengkapan, konsistensi, dan membuka jalan penyelidikan baru. Objektivitas yang timbul dari mengkritisi dan membandingkan jejaring interpretasi yang bersaing tentang fakta yang disepakati bersama. Perbedaan yang jelas antara pendekatan ini dan pendekatan konvensional studi politik adalah bahwa semua interpretasi bersifat sementara. Kita tidak dapat menggunakan logika pembuktian kesalahan seolah-olah kita seorang ilmuwan yang sedang melakukan percobaan untuk membantah penemuan sebelumnya. Tetapi, objektivitas bersandar pada kriteria perbandingan. Interpretasi yang kita pilih tidak akan berupa interpretasi yang mengungkapkan dirinya sebagai suatu kebenaran tertentu. Yang terjadi adalah, kita akan memilih interpretasi 'terbaik' melalui suatu proses perbandingan bertahap.⁴³

KRITIK TERHADAP PENDEKATAN INTERPRETATIF

⁴² David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 171.

⁴³ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 171-172.

Ilmuwan politik lainnya beraksi terhadap teori interpretatif melalui tiga cara pokok. Reaksi yang paling akomodatif mengakui bahwa interpretasi adalah bagian integral (tak terpisahkan) dari penjelasan sosial. Suatu contoh yang terkenal adalah ulasan Max Weber tentang *verstehen* (Weber 1978, Vol.1:4-22). Weber memperjuangkan penjelasan melalui jenis-jenis ideal yang memberikan jawaban yang memuaskan tentang tindakan menggabungkan analisis terhadap makna (maksud) maupun data objektif (yang bisa diukur). Beberapa ilmuwan politik menganggap teori interpretatif bermanfaat untuk bidang yang terbatas dari disiplin ilmu mereka: misalnya, kajian tentang ideologi. Akhirnya ilmuwan politik yang memusuhi, menolak pendekatan interpretatif karena dianggap tidak tepat, ataupun digantikan oleh suatu alternatif yang positif dan ilmiah. Para pakar teori interpretatif seharusnya menerima bahwa data objektif dapat memberikan pedoman yang berguna bagi penelitian dan memperkuat sejumlah kesimpulan. Mereka juga perlu menjawab kritikan khusus yang diajukan oleh para ilmuwan politik. Ada dua kritikan yang menonjol dan penting: *pertama*, bahwa teori interpretatif tidak secara memadai memperhitungkan realitas material; dan *kedua*, bahwa teori interpretatif tidak memberikan landasan untuk mengkritisi kehidupan sosial. Jenis teori interpretatif yang berbeda menampik kritikan tadi secara berbeda pula. Tak satupun kritikan ini yang bisa diterima sebagaimana adanya.⁴⁴

Tentang realitas material, menurut Marsh bahwa menurut sejumlah kritisi, pendekatan interpretatif tidak membolehkan batasan material terhadap aksi sosial. Meskipun para teoritis interpretatif harus tetap ngotot melawan segala bentuk reduksionisme ekonomi, mereka dapat membolehkan pengaruh ekonomi dalam beberapa cara. Sebagai permulaan, kita bisa menerima bahwa dilema seringkali mencerminkan keadaan material. Hal yang penting adalah keyakinan subyektif yang dipegangi orang tentang dunia, tetapi keyakinan ini seringkali timbul karena tekanan dalam dunia. Misalnya, dilema inflasi adalah suatu persepsi akurat yang disepakati tentang tekanan ekonomia yang nyata, bahkan jika ia terbentuk oleh berbagai hal yang berbeda, dan jawaban terhadap tekanan itu juga sama-sama berbeda. Ada sebuah dunia nyata di luar sana, dan ketika kita tidak mempunyai akses langsung terhadapnya, ia adalah sumber tekanan. Ditambah pula, hanya karena suatu pemerintahan bertindak atas pandangan tertentu terhadap dunia, bukan berarti pandangannya tentang dunia menentukan efek tindakannya. Efek akan tergantung pada bagaimana yang lain bereaksi, dan reaksi mereka akan secara kolektif membentuk realitas material yang relevan. Satu contoh, entah apakah kebijakan baru terhadap pengangguran jangka panjang akan membuat mereka memperoleh pekerjaan, itu tergantung

⁴⁴ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 180-181.

pada bagaimana mereka bereaksi terhadap kesempatan yang diberikan kepada mereka, bagaimana mereka memandang mereka, dan keadaan ekonomi.⁴⁵

Para kritikus yang lain juga mengeluhkan bahwa pendekatan interpretatif tidak memperhitungkan soliditas dan keuletan institusi. Kita menyatakan bahwa mereka bisa, tergantung pada bagaimana kita memahami institusi. Banyak teori interpretatif sekarang ini yang menyangkal bahwa institusi mempunyai hakikat mendasar. Mereka menantang kita untuk membedah institusi: yakni, menganalisis cara bagaimana mereka dihasilkan, ditiru, dan diubah melalui keyakinan, preferensi, dan tindakan individu. Bahkan, ketika suatu institusi mempertahankan kebiasaan yang sama meskipun personilnya berubah, ia melakukannya hanya karena personil belakangan tadi memegang keyakinan dan preferensi yang sama dengan pendahulu mereka. Jadi, kita tidak bisa mengatakan bahwa teori interpretatif absen dalam soal institusi, melainkan bahwa ia memikirkan kembali hakikat institusi. Teori interpretatif memandang institusi sebagai endapan hasil dari keyakinan dan preferensi tertentu.⁴⁶

Kritik lainnya terhadap teori interpretatif menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai kekuatan kritik. Varian teori interpretatif yang terinspirasi oleh hermeneutika dan etnologi tampaknya harus menerima pemahaman dari orang-orang yang mereka teliti. Namun kita bisa mengalamatkan keyakinan tak sadar atau bahkan tak rasional kepada orang dalam satu proses interpretasi. Deskripsi padat kita masih interpretasi kita tentang konstruksi orang lain, dan logika membandingkan jaringan interpretasi masih berlaku. Demikian juga, berbagai macam teori interpretatif yang terinspirasi oleh post-strukturalisme dan posmodernisme dapat tampak kekurangan gagasan tentang kebenaran yang bisa digunakan untuk menganggap salah satu keyakinan. Namun, pendekatan antropologis kita terhadap objektivitas berarti bahwa kita dapat menolak sejumlah keyakinan tanpa berdasar gagasan tentang kebenaran mutlak. Bahkan, karena kita menolak kebenaran mutlak, kita terpaksa menentang ideologi-ideologi politik yang mengklaim didasarkan pada kebenaran semacam itu. Kita harus merombak semua wacana yang mencoba menutup diri, atau yang menolak alternatif-alternatif karena tidak masuk akal atau tidak ada. Perombakan semacam itu akan berlaku bukan hanya terhadap fasisme atau komunisme, namun juga pada banyak variasi universalisme liberal (Bevid 2000).⁴⁷

Tentu saja, menyalahkan sistem keyakinan sebagai keliru bukan berarti menolak mereka sebagai bersifat ideologis dalam pengertian sebagai refleksi kepentingan suatu kelas. Oleh karena teori interpretatif menentang reduksionisme ekonomi, ia harus menghindari konsep ideologi

⁴⁵ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 181.

⁴⁶ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 182.

⁴⁷ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 182.

semacam itu. Meskipun demikian, ia dapat menyimpan gagasan tentang ideologi sebagai keyakinan yang terdistorsi, di mana distorsi itu diidentifikasi sebagai penyimpangan dari norma perumusan keyakinan. Jadi, ideologi harus mempunyai hubungan yang erat dengan keyakinan yang bohong, yang tak-sadar, dan yang bertentangan. Bayangkan bahwa para politisi mengatakan bahwa pengangguran telah meningkat karena resesi global, sambil meyakini bahwa itu terjadi karena resesi global diperburuk oleh kebijakan pemerintah. Kita dapat menyalahkan ucapannya sebagai bersifat ideologis, bukan karena mereka salah, namun karena mereka terlibat dalam penipuan. Kata-kata mereka menyembunyikan keyakinan mereka yang sejati, demi keuntungan politik.⁴⁸

AKTUALISASI PENDEKATAN INTERPRETASI

Tradisi interpretatif jelas lain dari positivisme. Namun, ia lebih luas dibanding positivisme, dan lebih banyak bagian yang akan berurusan dengan berbagai variannya. Meski demikian, akan bermanfaat untuk memulai dengan suatu uraian tentang ini dari pendekatan interpretatif. Menurut penjelasan Marsh dapat diperoleh gambaran secara komprehensif dengan menguraikan sebagai berikut:⁴⁹

Pertama, dalam tradisi interpretis, para peneliti menolak gagasan bahwa dunia eksis secara independen dari pengetahuan kita tentangnya. Namun, mereka berpendapat bahwa dunia dikonstruksikan secara sosial atau diskursif. Pendapat ini berlawanan secara diametral dengan positivisme, tetapi mempunyai beberapa ciri yang sama dengan beberapa variasi modern dari realisme. Maka, dalam istilah ontolog, posisi ini adalah anti-fundasionalis.

Kedua, hal ini berarti bahwa bagi peneliti yang bekerja dalam tradisi ini, fenomena sosial tidak eksis secara independen atau terlepas dari interpretasi kita tentang mereka; melainkan pemahaman/interpretasi fenomena sosial inilah yang mempengaruhi hasil. Dengan demikian, makna/interpretasi terhadap fenomena sosial-lah yang penting; makna/interpretasi yang hanya bisa ditetapkan dan dipahami dalam wacana atau tradisi. Akibatnya, kita harus fokus pada identifikasi wacana atau tradisi tadi, dan menetapkan interpretasi.

Ketiga, namun, kita juga harus mengakui bahwa analisis 'objektif' itu mustahil. Ilmuwan sosial (tentu saja kaum interpretis tidak akan menggunakan ini) tidaklah disitimewakan, melainkan mereka sendiri beroperasi dalam wacana atau tradisi. Akibatnya, ilmu pengetahuan bermuatan teoritis atau diskursif. Dengan demikian, posisi ini mengakui hermeneutika ganda.

Posisi ini mempunyai implikasi metodologis yang jelas. Ia menyatakan bahwa tidak ada kebenaran objektif, bahwa dunia ini terkonstruksi secara sosial, dan bahwa peran ilmuwan sosial

⁴⁸ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 183.

⁴⁹ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 31-32.

adalah untuk mempelajari konstruksi sosioal tadi. Metode kuantitatif dapat menjadi instrumen yang tumpul dan bisa menghasilkan data yang menyesatkan. Sebaliknya, kita perlu memanfaatkan metode kualitatif—wawancara, kelompok fokus, sketsa gambaran, dan seterusnya—untuk membantu kita menentukan bagaimana orang memahami dunianya. Jadi, misalnya, seseorang yang beroperasi dari dalam tradisi ini mempelajari partisipasi politik akan memulai dengan mencoba menentukan bagaimana orang memahami ‘politik’ dan partisipasi politik.

Berdasarkan hal tersebut salah satu varian pendekatan interpretasi yang paling populer dan banyak digunakan dalam penelitian kajian politik Islam adalah hermenetika. Aspek metodologisnya sebagaimana dijelaskan oleh Thompson dengan membagi kerangka metodologi ‘hermeneutika mendalam’ ke dalam tiga fase prinsip atau prosedur, diuraikan masing-masing fase sebagai berikut:⁵⁰

Fase pertama, yang dapat dikatakan sebagai ‘*analisa sosial-historis*’, berhubungan dengan kondisi sosial dan historis produksi, penyebaran dan penerimaan bentuk-bentuk simbol. Fase ini penting karena bentuk-bentuk simbol tidak berada dalam suasana *vacuum*: ia merupakan fenomena sosial yang *contextualized*, ia produksi, disebarkan dan diterima dalam kondisi sosial-historis tertentu yang dapat direkonstruksi berdasarkan bantuan metode empiris, observasional dan dokumentasi.

Fase kedua, kerangka hermeneutika yang mendalam dapat digambarkan sebagai ‘*analisis formal atau diskursif*’. Untuk melakukan analisa formal atau diskursif berarti mempelajari bentuk-bentuk simbol sebagai konstruksi simbol yang kompleks yang menunjukkan struktur artikulasinya. Fase ini penting sebab ia merupakan fenomena sosial yang *cotextualized* dan sesuatu yang lebih: ia merupakan konstruksi simbolik, yang melalui ciri-ciri strukturalnya, mampu dan mengkalim merepresentasikan sesuatu, menyimbolkan sesuatu, menyatakan sesuatu tentang sesuatu. Ini merupakan aspek tambahan bentuk-bentuk simbol yang tidak dapat direduksi dan membutuhkan bentuk-bentuk analisa yang berbeda, untuk kemudian dilakukan fase analisa terhadap susunan internal bentuk-bentuk simbol yang berhubungan dengan sifat, bentuk dan relasi strukturalnya. Tapi fase analisa ini, sekalipun sangat logis, dapat menyesatkan ketika berpindah dari kerangka hermeneutik-mendalam dan diikuti sebagai sebuah tujuan akhir. Analisa formal atau diskursif dapat menjadi—dalam beberapa contoh tertentu—

⁵⁰ Thompson, John B. *Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa...* Halaman: 35 - 36.

penerapan yang abstrak, tidak berhubungan dengan kondisi sosial-historis dan mengabaikan apa yang diekspresikan oleh bentuk-bentuk simbol yang strukturnya mencoba disingkap.

Fase yang ketiga dan terakhir dari kerangka hermeneutika-mendalam adalah apa yang disebut '*interpretasi*' (atau re-interpretasi). Fase ini berhubungan dengan penjelasan yang detail dan ketaif dari apa yang dikatakan dan direpresentasikan oleh sebarang simbol; ia berhubungan dengan konstruksi makna yang ketaif. Fase interpretasi mengandalkan hasil-hasil analisa sosial-historis serta analisa formal dan diskursif, tapi ia melampauinya dalam sebuah proses konstruksi sintetik. Ia menggunakan analisa sosial-historis serta analisa formal atau diskursif untuk menyoroti kondisi sosial dan ciri-ciri struktural sebarang simbol, dan ia berusaha menafsirkan simbol tersebut, menjelaskan secara detail dan mengelaborasi apa yang dikatakan, apa yang direpresentasikan, dan persoalan apa. Proses interpretasi ini sekaligus proses re-interpretasi, dalam artian bahwa ini adalah reinterpretasi—yang diperantarai oleh fase kerangka hermeneutika mendalam—terhadap domain objek yang sudah diinterpretasikan dan dipahami oleh subjek yang telah membangun dunia sosial-historisnya. Dalam menawarkan tafsiran suatu bentuk simbol, kita melakukan reinterpretasi terhadap domain pra-tafsir, dan selanjutnya memasukan dalam sebuah proses yang dapat, umumnya, menimbulkan resiko konflik (pertentangan) interpretasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka instrumen dalam metodologi penelitian hermeneutika lebih mengarah pada *human instrumen*. Artinya, peneliti dituntut agar dapat memainkan kekuatan intuitifnya, misalnya dalam menentukan sampel dan penangkapan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Sebagai *human instrumen*, peneliti juga perlu memperhatikan beberapa hal terkait dengan aktivitas dalam memperoleh data; (1) pengetahuan bahasa termasuk gramatikal serta peristilahan khusus terkait dengan konteks teks yang dikaji; (2) memahami bagaimana sejarah teks itu dibentuk; dan (3) kepekaan dalam menangkap realitas sosial yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.⁵¹

Analisis penelitian hermeneutika pada dasarnya berinduk pada penelitian kualitatif. Sksn tetapi, salah satu wujud dari keunikan penelitian ini adalah analisis data yang bersifat proses. Proses hermeneutika sama dengan analisis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam proses penemuan makna. Berdasarkan pandangan Dilthey,

⁵¹ Darmiyati Zuchdi dan Wiwiek Afifah. *Analisis Konten, Etnografi & Grounded Theory, dan Hermeneutika dalam Penelitian...* Halaman: 241.

proses analisis data membutuhkan dua hal, yaitu bekal pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti itu sendiri dan kekuatan logika. Pengetahuan yang dimaksud adalah merujuk pada tataran gramatika kebahasaan dan pengetahuan yang bersifat historis. Dengan demikian, proses analisis dalam hermeneutika akhirnya mampu menjadi cermin di mana makna yang terkandung dalam teks akhirnya dapat dipantulkan kembali. Akhirnya, pantulan tersebut akan membawa satu gambaran yang lebih mudah untuk dipahami. Itulah esensi dari analisis dalam penelitian hermeneutika. Peneliti akhirnya mampu menafsirkan atau membawa kembali isi teks menjadi mudah dimengerti.⁵²

1. KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan singkat tentang konsepsi dan ulasan aktualisasi pendekatan interpretatif dalam kajian pemikiran politik Islam, dapat disimpulkan dengan mengutip pendapat Marsh yang menjelaskan bahwa teori interpretatif meliputi banyak pendekatan, yang berlawanan dengan positivisme yang menjadi dasar bagi begitu banyak cabang ilmu politik. Ia menganggap serius peran gagasan dan makna dalam kehidupan individu dan praktik sosial. Kebanyakan pakar teori interpretatif menyatakan bahwa sifat dasar penuh-makna kehidupan manusia menjadikan model ilmu alam tidak tepat untuk studi politik. Beberapa diantara mereka berisikeras bahwa ilmu kemanusiaan harus memahami objek yang mereka teliti, daripada sekedar mencari penjelasan menurut mereka. Pakar yang lainnya menuntut agar ilmu kemanusiaan bersifat penjelasan, namun membedakan bentuk naratif penjelasan dari bentuk sempit sebab-akibat yang ditemukan dalam kebanyakan ilmu alam. Meskipun semua penjelasan interpretatif berfokus pada gagasan dan makna, mereka sering mempunyai pandangan berbeda tentang hakikatnya. Banyak perdebatan kunci mengikuti munculnya pos-strukturalisme dan posmodernisme perihal hakikat subjek dan batas-batas nalar. Banyak variasi tradisional interpretasi yang cukup berbahaya dengan mencakup analisis tentang subjek sebagaimana otonom, dan suatu analisis tentang nalar sebagai murni dan universal. Mereka menganjurkan kita membedah praktik dan tradisi. Sebaliknya, variasi interpretasi postmodern dan post-strukturalis berdiri berhuyung-huyung dalam menyangkal jangkauan apa pun terhadap subjek dan nalar. Masa depan teori interpretatif bertumpu pada satu di antara dua arah. Kita bisa membangkitkan suatu subjek yang merupakan seorang agen, tetapi bukan agen yang otonom, dan penalar lokal yang tidak pernah menjadi universal.⁵³

⁵² Darmiyati Zuchdi dan Wiwiek Afifah. *Analisis Konten, Etnografi & Grounded Theory, dan Hermeneutika dalam Penelitian...* Halaman: 241-242

⁵³ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik...* Halaman: 183-184.

Dalam rangka pembuktian untuk menentukan kebenaran penggunaan pendekatan interpretasi, sebagaimana telah ditegaskan Thompson bahwa justifikasi suatu interpretasi mensyaratkan prinsip tidak adanya pemaksaan (*non-imposition*) dan bahwa—dengan garis bentuk yang dibangun dengan prinsip tersebut—kita dapat mengembangkan suatu argumen dalam konteks yang spesifik untuk mempertahankan atau mengkritisi interpretasi tertentu, dapat menunjukkan apakah ia masuk akal atau tidak masuk akal, dapat dibenarkan atau tidak dapat dibenarkan, dalam menyoroti bukti dan landasan yang diajukan dalam konteks penelitian. Selanjutnya, yang dimaksudkan dengan interpretasi dalam pandangannya adalah tentang domain obyek yang terdiri dari—salah satunya—subyek-subyek seperti diri kita; dan bentuk-bentuk kasus yang sedang kita upayakan untuk ditafsirkan sudah dipahami—dalam pemahaman tertentu—oleh subyek-subyek yang membangun dunia sosialnya dan yang memproduksi, menerima dan memahami bentuk-bentuk simbol sebagai bagian rutin dari kehidupan sehari-hari.⁵⁴

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens K. 1981. *Filsafat Barat Abad XX*. Jakarta: Gramedia.
- Bleicher, Josep. 1980. *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Creswell, John W. 2019. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi ke-4 (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*. Edisi ke-3 (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanafi, Hasan. 2003. *Liberalisasi, Revolusi, Hermeneutik*. Terjemahan: Jajat Firdaus. Yogyakarta: Prisma,
- Heywood, Andrew. 2016. *Ideologi Politik Sebuah Pengantar*. (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. (terjemahan) Jakarta: Prenada Media Group.
- Marsh, David dan Gerry Stoker. 2010. *Teori dan Metodologi dalam Ilmu Politik*. Terjemahan. Bandung: Nusa Media.
- Palmer, Richard E. 2022. *Hermeneutika: Teori Interpretasi dalam Pemikiran Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, dan Gadamer*. (Terjemahan: Stephanus Aswar Herwinarko). Yogyakarta. IRCiSoD.

⁵⁴ John B Thompson. *Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa...* Halaman: 346.

- Patterson, M. E. dan D. R. Williams. 2002. *Collecting and Analyzing Qualitative Data: Hermeneutic Principles, Methods, and Cases Examples*. Champaign, Illinois: Sagamore Publishing.
- Shihab, M. Quraish. 2013. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Quran*. Tangerang. Lentera Hati.
- Thompson, John B. 2014. *Analisis Ideologi Dunia: Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia*. (terjemahan). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Thompson, John B. 2015. *Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa*. (terjemahan). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Zimmermann, Jens. 2021. *Hermeneutika: Sebuah Pengantar Singkat*. (Terjemahan: Leonart Maruli). Yogyakarta. IRCiSoD.
- Zuchdi, Darmiyati dan Wiwiek Afifah. 2019. *Analisis Konten, Etnografi & Grounded Theory, dan Hermeneutika dalam Penelitian*. Jakarta. PT Bumi Aksara.